

# PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN DIMENSI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA *TAX AVOIDANCE* DI BURSA EFEK INDONESIA

Ni Nyoman Kristiana Dewi<sup>1</sup>  
I Ketut Jati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
e-mail: kristianadewii@yahoo.com / telp: +62 81 735 54 17

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

## ABSTRAK

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *self assesment system* sejak dimulainya tax reform pada awal tahun 1984, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, melaporkan, serta membayar sendiri pajak terutang. Dengan adanya penerapan sistem tersebut sangat diharapkan kemauan dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menyebabkan upaya penghindaran pajak yang marak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, dengan memperoleh jumlah observasi sebanyak 144. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* masing-masing sebesar 0,012, 0,005, dan 0,017.

**Kata kunci:** karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, *tax avoidance*, tata kelola perusahaan

## ABSTRACT

At the beginning of 1984, the tax system in Indonesia turned into self-assessment system that gives full credence to the taxpayer to calculate, report, and pay their own taxes payable. With the implementation of the system is expected taxpayer compliance in performing their tax obligations according with the applicable tax laws. The non-compliance of taxpayer can cause tax avoidance. This research aims to examine the effect of the executive character, corporate characteristics, and good corporate governance on tax avoidance. This research focused on companies listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2012. Hypothesis testing using multiple regression. Regression test results show that the firm's risk, audit quality, and audit committees affect the tax avoidance amounting to 0.012, 0.005, and 0.017.

**Keywords:** corporate characteristics, executive character, corporate governance, tax avoidance

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat

diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellen, 2003). Dyreng *et al.* (2010) menguji pengaruh individu *Top Executive* terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* diperoleh hasil

bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Selain itu karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi (Surbakti, 2012). Ciri khas suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaannya dan *multinational company*. Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Surbakti (2012) melakukan penelitian terkait pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan.

Selain karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, aturan struktur tata kelola perusahaan juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tata kelola perusahaan yang baik muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelola perusahaan yang

dapat menimbulkan *agency problem*. Hubungan antara pajak dengan tata kelola perusahaan yang baik telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006). Menurutnya, hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit. Annisa (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit dan kualitas audit yang dijadikan proksi dalam tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak serupa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook. Cahyani (2010) memaparkan kasus seperti ini juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3%. Bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia. Selain itu terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap *tax avoidance*.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk kausalitas. Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2010:12). Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (Y), risiko perusahaan (X1), ukuran perusahaan (X2), *multinational company* (X3), kepemilikan institusional (X4), proporsi dewan komisaris independen (X5), kualitas audit (X6), dan komite audit (X7). Risiko perusahaan (X1) adalah risiko yang terjadi pada perusahaan dan akan berdampak pada kelangsungan hidup usaha tersebut. Ukuran perusahaan (X2) adalah besar atau kecilnya perusahaan yang tercermin dari total asetnya. *Multinational company* (X3) adalah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berada di negara yang berbeda-beda. Kepemilikan institusional (X4) adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor. Proporsi dewan komisaris independen (X5) adalah persentase perbandingan antara komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan. Kualitas audit (X6) adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Komite audit (X7) adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dengan perusahaan. *Tax avoidance* (Y) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarnya dengan cara berusaha meminimalkan laba perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Namun perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti akan dikeluarkan dari sampel, karena populasi dipilih dengan

menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:122).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 36 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria peneliti selama periode 2009-2012. Dengan demikian banyaknya observasi dalam penelitian ini sebanyak 144.

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi. Tabel hasil uji asumsi klasik tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

Parameter yang diuji	Uji Normalitas		Uji Multikolonieritas		Uji Heterokedasitas	Uji Autokorelasi
	Z	$\rho$	Tolerance	VIF	Sig.	DW
<i>Unstandardized Residual</i>	0,808	0,531				
Risiko Perusahaan			0,897	1,115	0,716	
Ukuran Perusahaan			0,575	1,739	0,386	
<i>Multinational Company</i>			0,652	1,535	0,250	
Kepemilikan Institusional			0,806	1,240	0,166	
Proporsi Dewan Komisaris Independen			0,873	1,146	0,493	
Kualitas Audit Komite Audit			0,509	1,963	0,367	
Durbin-Watson			0,726	1,377	0,107	1,901

Sumber: Data sekunder diolah, 2013

Besarnya nilai statistik Kolmogorov Smirnov adalah 0,808 dengan nilai  $\rho$  0,531. Jika digunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau 0,05 maka nilai  $\rho$  lebih besar dari  $\alpha$  yang berarti bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak saling berkorelasi secara signifikan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa data yang dianalisis memenuhi asumsi

multikolonieritas. Tingkat signifikansi ketujuh variabel tersebut diatas 5% atau 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa model regresi tersebut terbebas dari asumsi heterokedastisitas. Dengan  $k=7$  dan  $n=144$  pada  $\alpha=0,05$  diperoleh  $d_l=1,64$  dan  $d_u=1,83$  sehingga nilai DW 1,901 terletak diantara nilai  $d_U$  dan  $4-d_U$  yang merupakan daerah bebas autokorelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data di penelitian ini.

Uji regresi linier berganda juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji analisis linier berganda tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

<b>Uji Statistik t</b>	<b>B</b>	<b>Sig.</b>
Konstanta	0,865	0,000
Risiko Perusahaan	-0,114	0,012
Ukuran Perusahaan	-0,028	0,139
<i>Multinational Company</i>	-0,052	0,056
Kepemilikan Institusional	-0,075	0,278
Proporsi Dewan Komisaris Independen	0,078	0,331
Kualitas Audit	0,087	0,005
Komite Audit	-0,068	0,017
<b>Uji Statistik F</b>		
Nilai F	3,444	
Sig.	0,002	
<b>Uji Koefisien Determinasi</b>		
R Square	0,151	
Adjusted R Square	0,107	
<i>Dependent Var: Tax Avoidance</i>		

Sumber: Data sekunder diolah, 2013

Berdasarkan uji statistik t pada Tabel 2 menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk risiko perusahaan sebesar 0,012 ( $\rho < 0,025$ ), kualitas audit sebesar 0,005 ( $\rho < 0,025$ ), dan komite audit sebesar 0,017 ( $\rho < 0,025$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit. Nilai probabilitas F sebesar 0,002 yang jauh lebih kecil dari  $\alpha = 0,025$  yang berarti bahwa secara simultan variabel bebas dalam model dapat mempengaruhi variabel terikat secara signifikan atau setidaknya terdapat satu variabel bebas yang dapat

mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Koefisien determinasi dengan parameter Adjusted  $R^2$  sebesar 0,107 yang berarti bahwa 10,7% variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variasi dari ketujuh variabel independen. Sedangkan sisanya 89,3% dijelaskan oleh faktor lain.

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk risiko perusahaan lebih kecil dari  $\alpha$  (0,025) yaitu sebesar 0,012 dan koefisien regresi sebesar -0,114 sehingga  $H_1$  diterima. Hal itu menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk ukuran perusahaan lebih besar dari  $\alpha$  (0,025) yaitu sebesar 0,139 dan koefisien regresi sebesar -0,028 sehingga  $H_2$  ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar ataupun perusahaan kecil pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan.

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk *multinational company* lebih besar dari  $\alpha$  (0,025) yaitu sebesar 0,056 dan koefisien regresi sebesar -0,052 sehingga  $H_3$  ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa *multinational company* tidak berpengaruh



terhadap *tax avoidance*. Perusahaan multinasional mempunyai pengaruh yang besar dalam politik global dan ekonomi sehingga perusahaan multinasional dapat melakukan lobi politik. Negara dan distrik politik regional sering menawarkan insentif untuk perusahaan multinasional seperti pemotongan pajak, bantuan pemerintah, dan infrastruktur yang lebih baik (Belinda, 2011 dalam Asfiyati, 2012). Dengan demikian mereka tidak perlu melakukan tindakan penghindaran pajak karena pemerintah sendiri sudah memberikan kelonggaran bagi perusahaan multinasional.

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk kepemilikan institusional lebih besar dari  $\alpha$  (0,025) yaitu sebesar 0,278 dan koefisien regresi sebesar -0,075 sehingga  $H_4$  ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional.

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk proporsi dewan komisaris independen lebih besar dari  $\alpha$  (0,025) yaitu sebesar 0,078 dan koefisien regresi sebesar 0,331 sehingga  $H_5$  ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang berarti bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha pencegahan tindakan *tax avoidance*. Penambahan anggota dewan komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan yang penting sehingga kinerja dewan komisaris tidak meningkat.

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk kualitas audit lebih kecil dari  $\alpha$  (0,025) yaitu sebesar 0,005 dan koefisien regresi sebesar 0,078 sehingga  $H_6$  diterima. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Asfiyati, 2012).

Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk komite audit lebih kecil dari  $\alpha$  (0,025) yaitu sebesar 0,017 dan koefisien regresi sebesar -0,068 sehingga  $H_7$  diterima. Hal itu menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat tiga variabel yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Variabel tersebut antara lain risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit. Sedangkan sisanya yaitu ukuran perusahaan, *multinational company*, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Saran yang dapat diberikan yaitu agar definisi *tax avoidance* sebagai kegiatan mengefisienkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku sudah wadatnya untuk

diperbaiki. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan bahwa kegiatan *tax avoidance* yang diperbolehkan adalah sepanjang upaya tersebut dilakukan tidak semata-mata untuk menghindari pajak dan masih dalam batas kebiasaan bisnis yang baik.

## REFERENSI

- Annisa, Nuralifmida Ayu. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei 2012, hal 95-189.
- Asfiyati. 2012. Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Brown, R. E and Mazur, M. J. 2003. IRS'S Comprehensive Approach to Compliance Measurement. *National Tax Journal*, Vol. 56, No. 3, September 2003, pp 689-700.
- Budiman, Judi. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*.
- Cahyani, Nur. 2010. Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2010, hal 10-23.
- Desai, Mihir A. and Dhammika Dharmapala. 2008. Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*.
- Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 85, Juni 2010, pp 1163-1189.
- Frey, B. S and Torgler, B. 2007. Tax Morale and Conditional Cooperation. *Journal of Comparative Economics*, Vol. 35, No. 1, pp 136-159.
- Gravelle, Jane G. 2009. Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. *National Tax Journal*, Vol. LXII, No. 4, pp 727-753.
- Hanlon, Michelle and Shane Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol 50, pp 127-178.
- Hanum, Hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Skripsi* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hormati, Asrudin. 2009. Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 2, Mei 2009, hal 288-298.

- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Laraswita dan Indrayani. 2010. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi*.
- Lewellen, Katharina. 2003. Financing Decisions When Managers Are Risk Averse. *Working Paper*, Mit Sloan School of Management.
- Low, Angie. 2006. Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. *Fisher College of Business Working Paper* September 2006, 03-003.
- Mangoting, Yenni. 1999. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Mei 1999, hal 43-53.
- Michelon, Giovanna dan Antonio Parbonetti. 2010. The Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosure. *Springer Science & Business Media* 14 September 2010.
- Rego, Sonja Olhoft. 2003. Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 20, No. 4, Winter 2003, pp 805-833.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Surbakti, Theresa Adelina Victoria. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Sartika, Widya. 2012. Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Depok.
- Shleifer, A., dan Vishney, R. 1986. Large Shareholders and Corporate Control. *Journal of Political Economy* 94: 461-488.
- Uppal J.S. 2005. Kasus Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Economic Review Journal*, 201.
- Xynas, Lidia. 2011. Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*, Vol. 20, No. 1.